

ANTISIPASI MISI BUDAYA URBANIS DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH PADA WILAYAH PARIWISATA DI BALI^{*)}

Oleh

Emiliana Mariyah

I. Pendahuluan

Kunjungan wisatawan mancanegara yang langsung datang ke Bali dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan itu tidak terlepas dari dampak adanya kebijakan pemerintah yang memberlakukan bebas visa sejak 17 Agustus 1992. Indikasi lainnya pesatnya perkembangan pariwisata ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah pembangunan hotel berbintang. Tahun 1995 hotel berbintang berjumlah 86 hotel, dengan jumlah kamar 14.268 buah. Tahun 1999 bertambah menjadi 104 buah hotel berbintang dengan jumlah kamar 15.906 buah (Bali dalam Angka, 1999: 287).

Perkembangan kepariwisataan Bali telah menghabiskan luasan sekitar 27,5 % dari luas Pulau Bali yakni 5.632,8 km². Dampak pengembangan pariwisata salah satunya adalah tercemarnya lingkungan akibat timbulnya pembangunan fisik yang tidak terkontrol (Erawan, 1994: 30).

Terbukanya secara luas kesempatan berusaha dan lapangan kerja di sektor pembangunan pariwisata di Bali telah mengundang para investor, pencari kerja, serta migran/urbanis dari daerah lain untuk masuk ke Bali. Karena itu pesatnya pertumbuhan penduduk, memperberat tata

^{*)} Makalah disampaikan dalam simposium dan lokakarya Internasional II Globalisasi dan Kebudayaan Lokal: Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru 18—21 Juli 2001 Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang Sumatera Barat.

ruang, tata bangunan yang merupakan biang keladi dari kesemrawutan pembangunan, khususnya di Kodya Denpasar.

Daerah pariwisata dianalogkan sebagai ruang yang dikerumuni orang dengan alasan untuk meningkatkan kehidupan. Dari perspektif ruang, bahwa ruang itu dihuni manusia dengan bermacam alasan. Ruang itu untuk mengembangkan kultur dan ruang itu untuk hidup atau untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Sesuai kebutuhan manusia, khususnya penduduk lokal, pespektif ruang bukan untuk kebutuhan jasmani tetapi lebih jauh untuk mengisi rohani. Yaitu budaya dan agama. Sedangkan yang dibawa penduduk pendatang yang heterogen tidak banyak mengenal kultur Bali yang pada akhirnya dapat menyulut substansi konflik.

Kedatangan urbanis pada suatu wilayah terkait dengan pemilihan pekerjaan dan pemukiman, yang sangat dipengaruhi oleh misi budaya dan struktur sosial para migran/urbanis. Struktur sosial secara operasional bahwa pemukiman kelompok urbanis di daerah tujuan tetap mempertahankan hubungan-hubungan dan kegiatan tradisional kelompok-kelompok. Bahasa daerah masing-masing masih dipakai dalam pembicaraan sehari-hari. Pemukiman-pemukiman melestarikan kesinambungan budaya melalui interaski sehari-hari, tukar menukar pikiran mengenai pekerjaan, sanak saudara dan bagaimana menyatakan tradisi adat untuk setiap masalah yang timbul dalam perantauan.

Dapat dipastikan bahwa kondisi pemukiman etnik seperti tersebut di atas akan cukup memiliki daya tarik untuk mendatangkan perantau-perantau kota yang baru. Menurut konsep Sunarto (1985) disebutkan migrasi berantai. Tidak mengherankan kalau kampung-kampung etnik ini menyerap para perantau yang datang, karena mereka memahami sanak saudara dari desa-desa asal sebagai penghubung dalam mencari pekerjaan dan penginapan sementara. Sedangkan misi

budaya: sebagai migran mereka ingin membawa kekayaan, pengetahuan dan pengalaman untuk memperkuat dan memperkaya kampung halaman (Pelly, 1994: 83).

Semenjak dua tahun terakhir, akibat kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah seperti Jakarta, Jawa Timur, Lombok, Timor Timur dan Maluku, daerah Bali khususnya Kabupaten Badung dan Kodya Denpasar menjadi tujuan urbanis dengan latar belakang mencari daerah aman dan mencari pekerjaan. Mereka itu tenaga *skilled* dan *unskilled*. Kondisi tersebut menyebabkan Bali, khususnya Kabupaten Badung dan Kodya Denpasar menjadi sesak dan kumuh. Sehingga Kabupaten Badung dan Kodya Denpasar mengalami pencemaran secara fisik, sosial dan budaya.

Makalah singkat ini akan mengkaji dampak misi budaya urbanis terhadap lingkungan fisik, sosial dan budaya, dan mengkaji pula usaha Pemerintah Daerah menertibkan dan mengatur administrasi untuk mengendalikan membanjirnya pendatang.

Manfaat penelitian secara teoretis merupakan pemahaman mengenai misi budaya urbanis, untuk mengantisipasi dampak yang bersifat negatif, dan secara praktis penemuan penelitian disumbangkan kepada penentu kebijakan jangka pendek dan jangka panjang.

Uraian ini bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan pengamatan empiris, kajian diawali dampak fisik, sosial dan budaya. Dalam konteks mengantisipasi budaya urbanis masalah konflik tidak bisa dihindari.

II. Hasil

Penelitian ini bertumpu pada pendapat Pelly (1994: 83) tentang misi budaya dan struktur sosial. Yaitu bagaimana para perantau mendapatkan penghasilan yang layak dengan membawa komunitas asalnya, dan bagaimana mempertahankan serta membina keharusan kultural untuk menghadapi perubahan struktur yang terjadi di daerah perantauan.

Dampak membanjirnya urbanis *skilled* dan *unskilled* ke Kodya Denpasar dan Kabupaten Badung dapat di telusuri melalui bidang fisik, budaya dan sosial. Di samping itu juga ditinjau adaptasi urbanis dan pelaksanaan otonomi daerah.

Bidang Fisik dan Budaya

Perspektif ruang sesuai kebutuhan manusia bukan hanya untuk memenuhi bidang jasmani, tetapi lebih jauh untuk mengisi rohani, yaitu di antaranya termasuk agama, yang juga menjadi ruang bebas tersendiri yang mudah dipetakonflikkan (Jamuin, 1998: 6). Dalam konteks yang dikatakan Jamuin, untuk mengkaji fenomena di Bali tuntutan ketat terhadap ruang oleh strategi budaya lokal, mereka menekan munculnya dominasi budaya asing, misalnya suara azan Masjid. Konflik tentang suara azan di Masjid dinilai suaranya terlalu keras dan dirasakan mengganggu mereka. Untuk mengantisipasi konflik tersebut diadakan konsesus oleh Pemda, terutama pada waktu hari Raya Nyepi, suara azan di Masjid supaya diperlemah suaranya.

Bentuk konflik yang lain yaitu pada suatu desa penduduk yang terdiri dari penduduk yang beragama Islam dan Hindu. Mereka mau membangun Balai Desa. Pada satu pihak penduduk yang beragama Hindu menghendaki merancang Balai Desa dengan arsitektur Bali, pada pihak lain kelompok Muslim ingin menonjolkan Islamnya. Akhirnya untuk mengantisipasi konflik ada titik temu, yaitu akulturasi yang berpolemik. Delapan tiang bangunan dirancang sesuai budaya Bali (Kosala Kosali Asta Bumi). Sementara atapnya menggunakan lambang bintang, kosen-kosen jendela berstyle Islam.

Konflik terjadi pula pada penggunaan nama sekolah dengan menggunakan nama istilah Bali. Untuk mengantisipasi terjadinya konflik pihak kelompok Kristen Protestan dan Kristen Katolik menggunakan istilah agama masing-masing. Sekolah SMU Kristen Katolik yang semula

menggunakan nama SMU Swastiastu, sekarang menggunakan SMU Santo Yoseph, dan SMU Kristen Protestan semula menggunakan SMU Widyapura, sekarang menggunakan nama SMU Harapan.

Dampak fisik dan budaya dari urbanis *skilled* terlihat pada fenomena yang disebut *frog jump* (katak lompat). Berkaitan dengan ruang menurut penduduk lokal ruang adalah sebuah tempat mengembangkan kultur yang homogen. Sementara etnik lain/urbanis mereka merasa bahwa ruang adalah untuk jasmani dan rohani dan Bali adalah wilayah RI. Penduduk pendatang yang heterogen, tidak mengenal hal yang suci dan tidak suci (*luan teben*). Ideologi nilai ini ruang menurut kultur Bali tidak bisa dikacaukan. Hal ini mengakibatkan beberapa kasus penduduk Kodya Denpasar berpindah ke daerah pedalaman atau pinggiran, karena mereka tidak mampu membangun rumah bertingkat. Mereka merasa tempat pemujaan Sanghyang Widhi Wasa dan leluhur mereka tercemar, dengan kehadiran gedung bertingkat yang terletak di sebelah rumahnya. Adanya jemuran pakaian pada gedung bertingkat yang terletak di atas rumah mereka atau *Sanggah* mereka, dirasakan tidak menghormati atau mencemari tempat pemujaan (*Sanggah*) yang terlebih dahulu dibangunnya. Untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi konflik mereka menjual rumah di daerah perkotaan dan membeli tanah di pinggiran atau pedalaman yang dianggap tidak mengganggu kehidupan beragama mereka.

Dampak fisik yang ditimbulkan oleh urbanis *unskill* ditunjukkan pada kehunian kamar. Di daerah yang keadaan fisik perumahannya terlalu padat hunian dengan fasilitas yang tidak memadai, menurut Effendi (1993: 102) perkampungan inilah yang disebut pemukiman kumuh. Gambaran fisik pemukiman kumuh di Desa Tohpati, Kesiman, Denpasar Timur yaitu bangunan rumah yang terdiri dari 11 kamar, tiap kamar dihuni oleh 3 orang. Dilengkapi sebuah kamar

mandi, WC di sungai, bangunan rumah terdiri dari anyaman bambu. Bahkan menurut pengakuan Kelian Adat di banjarnya satu kamar dihuni oleh 12 buruh bangunan.

Di Denpasar Barat, Jl. Satelit Sanglah ukuran tanah 200 m², dibangun perumahan terdiri dari 20 kamar tiap kamar dihuni oleh satu keluarga atau bujangan. Penghuni yang sudah berkeluarga, mereka mempunyai satu sampai dua orang anak. Etnis yang bermukim di tempat ini adalah etnis Jawa, Madura dan Lombok. Pekerjaan mereka ada buruh bangunan, sopir, mahasiswa dan pedagang keliling (makanan dan minuman). Bangunan rumah tersebut bersifat permanen, tetapi saluran air tidak terurus. Pada kecamatan ini pula di Jl. Serma Made Pil dekat Super Market Alfa. Sebuah rumah permanen terdiri dari tiga kamar, tiap kamar dihuni masing-masing empat orang dan ruang tamu disewakan lagi kepada enam orang pekerja Super Market Alfa. Munculnya gejala pemukiman kumuh berkaitan erat dengan urbanisasi, terbatasnya kesempatan kerja di sektor industri dan meluasnya kegiatan informal dan terbatasnya fasilitas. Fenomena hunian yang padat menunjukkan bahwa urbanis di tempat tujuan hidup hemat, makan apa adanya, lauk biasanya hanya sayur yang pedas. Hal ini dilakukan sementara di daerah asal ada yang dibiayai yaitu anak-anak dan istrinya. Seperti yang dikatakan Pelly (1994: 278) bahwa orang Minangkabau sebagai migran sirkuler cenderung memilih pekerjaan dan pemukiman tempat mereka menyelenggarakan misi budaya mereka. Sebagai migran misi mereka membawa kekayaan, pengetahuan dan pengalaman untuk memperkuat dan memperkaya kampung halaman. Seperti urbanis di Kodya Denpasar dan Kabupaten Badung saat Lebaran mereka pulang mudik ke kampung halaman. Ditanyakan mengenai di mana hari raya Lebaran, mereka mengatakan:

“Saya pulang ke kampung untuk bersilaturahmi dan karena mempunyai rejeki mengadakan syukuran bersama kawan-kawan di kampung”.

Ada juga yang mengatakan:

“Tetangga saya di Jawa ada yang iri saya dapat membelikan perhiasan istri saya”.

Ada pula yang berkomentar:

“Saya hidup hemat di Bali untuk mencukupi kebutuhan di Jawa membiayai pendidikan anak sampai tamat SMA”.

Dampak Positif

Dampak positif yang dinikmati urbanis di Bali, dapat membiayai anak sekolah, membelikan perhiasan istrinya, tetapi dampak negatif penghunian pemukiman yang penuh sesak dalam ruang kamar atau lingkungan yang tidak sehat, dapat menimbulkan terjangkitnya penyakit seperti yang pernah terjadi pada tahun 1985, di daerah kumuh di Jematang, pada pinggiran aliran sungai Badung, pada wilayah Kecamatan Denpasar Barat, terjangkit penyakit kolera. Sebagai daerah pariwisata kejadian ini akan berdampak negatif terhadap ketenangan wisatawan yang tinggal di Bali.

Dampak Sosial

Menurut Aparat Desa Dauh Puri Kelod yang pernah melakukan razia penduduk pendatang, ia mengatakan sumber masalah munculnya daerah kumuh dan kriminalitas adalah penyewaan tanah, dalam jangka waktu 5 –10 tahun yang kemudian tanah ini dibangun rumah oleh pendatang. Mereka tidak melapor ke aparat setempat. Rumah ini disewakan kepada siapapun tanpa memperhatikan identitas penyewa. Kondisi seperti ini tidak bisa dihindari penghunian oleh orang-orang yang sering melakukan keributan dan kriminalitas. Karena itu laporan Polda Bali, selama bulan Januari 2001 terdapat 84 kejadian kriminalitas di Bali sebagai berikut.

a) Pencurian dengan kekerasan = 11

- b) Pencurian dengan senjata tajam = 38
- c) Curanmor = 25
- d) Narkotika = 2
- e) Kasus penganiayaan dengan senjata tajam = 8

Adaptasi Urbanis di Daerah Perantauan

Pertumbuhan penduduk, meluasnya pemukiman penduduk yang mendesak tanah pertanian yang produktif, konsekwensinya lahan pertanian di Kodya Denpasar dan Kabupaten Badung semakin sempit. Petani di Kodya Denpasar dan Kabupaten Badung merasa stres tanah pertanian sempit, irigasi terbatas, sawah mulai ditinggalkan. Mereka bekerja di non pertanian sebagai buruh bangunan. Mereka merasakan bekerja sebagai buruh bangunan mendapatkan pendapatan lebih daripada sebagai petani penggarap (clien). Fenomena ini menyebabkan memudahkan ikatan patron-clien, antara pemilik (sebagai majikan) dan penggarap (buruh tani).

Untuk mengerjakan tanah yang semakin menyempit petani mencari tenaga upahan untuk mencangkul. Memudarnya ikatan patron-clien diikuti menghilangnya *sekaa manyi* (kelompok penuai padi). Tenaga kerja untuk mencangkul, menuai padi dikerjakan oleh etnis non Bali. Peluang-peluang kerja yang tidak dimanfaatkan etnis Bali, memberi kesempatan kerja kepada etnis non Bali seperti etnis Jawa dan Lombok. Selain tenaga kerja lebih murah, pekerja non Bali lebih cepat menyelesaikan pekerjaan. Seperti penggalian selokan untuk perbaikan trotoar dan pasang pipa. Menurut pengakuan Kelian Adat di Desa Kesiman kalau buruh bangunan etnis Bali menyelesaikan penggalian untuk membangun tiang tower selama empat belas hari dan ongkos per hari Rp. 20.000,00, sedangkan buruh bangunan etnis Jawa dapat menyelesaikan pekerjaan

tersebut dalam dua hari dengan biaya Rp. 80.000,00. Karena itu buruh banguann etnis Jawa banyak dimanfaatkan pada galian C.

Peluang-peluang kerja lainnya yang tidak dimanfaatkan etnis Bali, seperti pedagang bakso keliling, pedagang mie ayam, pedagang jamu, pedagang rujak, pedagang tahu tempe, pedagang minuman, pedagang lesehan, dimanfaatkan oleh etnis dari Jawa dan Lombok. Karena itu, pada hari Raya Lebaran di Kodya Denpasar dan Kabupaten Badung atau Bali umumnya mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan tersebut di atas, karena kebanyakan dari mereka pulang ke kampung halaman untuk merayakan hari raya Lebaran. Fenomena ini merupakan suatu ketergantungan jasa antar etnis seperti yang dikatakan Hans Daeng (2000: 44-45) bahwa masalah integrasi bangsa menunjuk pada kebutuhan untuk menjamin bahwa ikatan emosional yang cukup kuat dapat menghasilkan solidaritas dan kerelaan untuk bekerjasama dikembangkan dan dipertahankan untuk menghindari konflik.

Pelaksanaan Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah tentang Otonomi Daerah 2001: 43).

Secara operasional otonomi daerah salah satu di antaranya adalah pelaksanaan peraturan daerah tentang kependudukan yang mengatur penduduk pendatang. Bagi penduduk pendatang pelaksanaan SK Walikota Nomor 593 yang menetapkan bahwa para migran yang datang ke kota Denpasar mempunyai syarat-syarat sebagai berikut.

- 1) Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD)

- 2) Surat Pernyataan Menjamin
- 3) Surat Keterangan Jaminan Bekerja
- 4) Surat Jalan
- 5) Surat Pindah
- 6) Surat Keterangan Keterampilan

Setelah surat-surat ini disampaikan ke Kepala Desa, yang disertai uang jaminan sebesar Rp. 68.000,00 migran diberi kartu putih (SKPP). Besar kecilnya uang jaminan tergantung jauh dekatnya jarak asal pendatang. Yaitu berkisar Rp. 68.000,00 – Rp. 225.000,00. Jarak terdekat di luar Bali adalah Banyuwangi uang jaminan sebesar Rp. 68.000,00, jarak paling jauh yaitu daerah DKI, Sumatra, Kalimantan dan seterusnya sebesar Rp. 225.000,00. Uang jaminan dititipkan di Kepala Desa, kecuali mahasiswa, pegawai negeri, ABRI dan BUMN tidak terkena uang jaminan. Dari delapan Kabupaten di Bali migran dikenakan uang jaminan sebesar Rp. 20.000,00. Kalau mereka tidak berhasil mendapatkan pekerjaan, lalu uang jaminan dipakai untuk mengembalikan ke tempat asal. Setelah pendatang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, waktunya kurang lebih enam bulan, kemudian mereka diberi kartu SKPP. Tetapi selama adaptasi enam bulan tidak secara spontan mendapat KTP. Aparat lingkungan mengawasi akreditasinya. Keluhan para pendatang dari tujuh Kabupaten di Bali: mengapa sama-sama dari Bali migran diwajibkan membayar Rp. 20.000,00 dan mengurus SKPP (Surat Keterangan Penduduk Pendetang) untuk mendapatkan KTP. Hal ini terkait dengan konsep migrasi. Migrasi adalah suatu gerak penduduk secara geografis, spasial yang melibatkan perubahan tempat tinggal atau melakukan pindah tempat tinggal secara permanen atau relatif permanen (Rusli, 1985: 106). Sedangkan menurut Lee (1980: 5) migrasi adalah perubahan tempat tinggal secara permanen atau relatif permanen, tidak ada pembatasan baik perpindahan maupun sifatnya sukarela atau paksa. Menurut Lucas

(1987: 95) migrasi adalah perpindahan yang permanen atau semi permanen. Sedangkan urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota (Manning, 1985: 17).

Untuk mengatasi perpindahan penduduk yang tidak terkendali Kodya Denpasar melakukan razia di wilayahnya. Kepala Desa menjadi ujung tombak pelaksanaan penertiban penduduk pendatang di wilayahnya yang dibantu *Kelian Dinas* dan *Kelian Adat*. Persyaratan surat-surat yang disyahkan di desa terlebih dahulu ditanda tangani *Kelian Dinas* dan *Kelian Adat* sebagai suatu sosialisasi.

Menurut Kepala Desa Dauh Puri Kelod, dia telah melaksanakan sidak satu bulan (Mei 2001) di wilayahnya. Ia mengaku tidak banyak menghadapi permasalahan dalam melakukan tugasnya asal mereka diberi penjelasan, pemahaman, dan pengertian dan peraturan pemerintah daerah yang dipakai untuk menertibkan para pendatang. Di wilayahnya banyak mahasiswa yang terkena razia, karena tidak membawa surat-surat yang dipersyaratkan. Mereka dikumpulkan dan diajak dialog tentang peraturan yang sedang diterapkan. Pengakuannya justru yang menjadi ganjalan adalah para konsultan Pemda yang berasal dari Jawa, yang merasa orang penting, mereka tersinggung untuk membayar uang jaminan. Setelah lama berargumentasi dan berdialog dengan Kepala Desa Dauh Puri Kelod, akhirnya mereka mau membayar uang jaminan. Seperti yang dikatakan oleh Kusumohamidjojo (2000) bahwa konflik yang sudah ditempatkan dalam suatu mekanisme, biasanya merupakan tatanan sosial politik yang sudah dirasionalisasikan, sehingga konflik itu diselesaikan secara argumentatif. Malahan mereka menunjukkan nama-nama dan alamat kawan-kawanya yang juga harus membayar uang jaminan. Kasus lain yang dimuat Kompas 25 Mei 2001 terlampir.

III. Penutup

Dalam konteks mengantisipasi misi budaya urbanis sumber permasalahan di Kodya Denpasar dan Kabupaten Badung menurut Kepala Desa Dauh Puri Kelod adalah pengontrakan tanah yang lamanya 5 – 10 tahun. Tanah tersebut oleh pendatang dibangun kamar, kemudian oleh pengontrak kamar-kamar tersebut dikontrakkan lagi tanpa melihat identitas pengontrak. Pemukiman ini secara berantai memberikan informasi tentang Bali tempat yang mudah untuk mencari pekerjaan, dan Bali mudah mendapatkan penghasilan. Tanpa adanya pengawasan dari pemilik tanah maka hal-hal yang negatif yaitu masuknya pendatang yang berniat jelek tak terhindarkan lagi. Selama peluang kerja : pekerjaan penggalian C, penjual makanan-minuman belum dimanfaatkan penduduk setempat, dan penduduk setempat masih mengontrakkan tanah atau rumah kepada pendatang, maka konsekwensinya migran ke Bali tetap mengalir. Hanya yang perlu diperhatikan penertiban dan pengawasan terhadap pendatang dilakukan secara kontinu dan berkelanjutan.

Hendaknya pelaksanaan otonomi daerah dikoordinasikan secara ketat dan konprehensif. Kepala Desa sebagai ujung tombak pelaksanaan penertiban di wilayahnya diberikan pemberdayaan, penguasaan peraturan-peraturan yang diterapkan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kepala Desa diharapkan mempunyai peta pemukiman kumuh di wilayahnya dan melakukan pengawasan khusus terhadap wilayah-wilayah yang berisiko yaitu pembangunan rumah-rumah baik dalam bentuk permanen atau semi permanen yang dilakukan oleh pengontrak tanah. Perlu digalakkan IMB untuk pembangunan rumah yang permanen maupun yang non permanen. Hal ini dilakukan untuk mengawasi dan mengontrol rumah-rumah yang kumuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Statistik Propinsi Bali, 1999. *Statistik Wisatawan Mancanegara ke Bali Tahun 1999*, Denpasar.
- Daeng, Hans J., 2000. *Manusia Kebudayaan dan Lingkungan Tinjauan Antropologis*. Yogyakarta: Pustaka Rakyat.
- Effendi, Tadjuddin Noer, 1993. *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Erawan, I Nyoman, 1994. *Pariwisata dan Pembangunan Ekonomi: Bali Sebagai Kasus*. Denpasar: Upada Sastra.
- Jamuin, Ma'arif, 1999. *Manual Advokasi: Resolusi Konflik Antar-Etnik dan Agama*. Surakarta: CISCORE.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 2000. *Kebhinekaan Masyarakat di Indonesia. Suatu Problematik Filsafat-Kebudayaan*. Jakarta: Gramedia.
- Lee, Everett S., 1980. *Suatu Teori Migrasi*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM.
- Lucas, David, 1987. *Pengantar Kependudukan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.
- Manning, Chris, 1983. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Gramedia.
- Pelly, Usman, 1994. *Urbanisasi dan Adaptasi Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mondailing*. Jakarta: LP3ES.
- Peraturan Pemerintah tentang Otonomi Daerah 2001. Bandung: Citra Umbara.
- Rusli, Said, 1982. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta: LP3ES.
- Sunarto, 1985. *Penduduk Indonesia dalam Dinamika Migrasi 1971-1980*. Yogyakarta: Dua Dimensi.

